

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholder , yang dituangkan melalui Laporan Kinerja.

Sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebagai instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dan Rencana Strategis Balitbang Provsu 2013 – 2018 dalam sebuah Laporan Kinerja BalitbangProvsu Tahun 2017.

B TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C ASPEK STRATEGIS

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga Teknis yang melakukan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain :

1). Kelembagaan

Kelembagaan Balitbang Provsu mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

2). Peranan

Berdasarkan tugas dan fungsi, secara umum merubah tatanan hidup bernegara secara lebih baik agar mampu bersaing dengan negara – negara maju lainnya, dan secara khusus mengarahkan agar kualitas kebijakan dan perencanaan program pembangunan daerah menjadi lebih matang, berusia lama, relevan dengan kebutuhan serta dapat menyelesaikan isu–isu strategis yang dihadapi.

Berdasarkan tahapan waktu, peran di awal sebagai Input dalam proses penyusunan kebijakan strategis, peran antara untuk memberikan berbagai rekomendasi dalam implementasi program pembangunan daerah yang tengah berjalan baik sebagai kontrol maupun katalisator, dan peran di akhir untuk memberikan masukan dan

penilaian terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai bentuk evaluasi, untuk dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

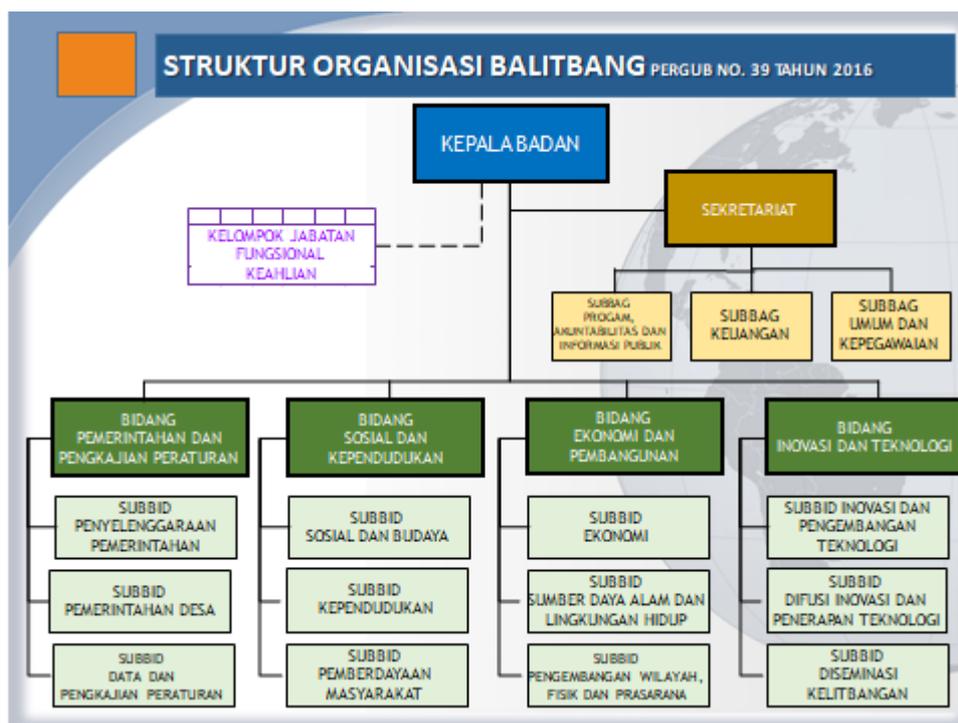


Gambar 1. Peran strategis balitbang

D STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang dibantu oleh

1 orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Bidang, 15 Orang Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian dan kelompok fungsional. Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur organisasi Balitbang Provsu

- a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan 3 (tiga) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
 3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Kependudukan;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup;

3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, fisik dan prasarana.
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

E SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Orang) |
|----|--|----------------|
| 1 | Jumlah SDM per 31 Desember 2017 | 48 |
| 2 | Mutasi selama tahun 2016 : | |
| | Pensiun | - |
| | Mutasi (masuk) | - |
| | Mutasi keluar | |
| | Meninggal | |
| 3 | Jumlah SDM per 31 Desember 2017 | 48 |

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan Jenjang Jabatan (Peran).

| No | Uraian | Jumlah |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Pejabat Struktural : | |
| | - Eselon II | 1 |
| | - Eselon III | 5 |
| | - Eselon IV | 15 |
| 2 | Pejabat Fungsional Peneliti | 7 |
| 3 | Pejabat Fungsional Arsiparis | - |
| 4 | Pelaksana | 20 |
| | Jumlah | 48 |

2). Berdasarkan Strata Pendidikan

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | S-3 | 0 |
| 2 | S-2 | 19 |
| 3 | S-1 | 19 |
| 4 | Diploma III | 0 |
| 5 | SLTA | 8 |
| 6 | SLTP | 1 |
| 7 | SD | 1 |
| | Jumlah | 48 |

3). Berdasarkan Golongan

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Golongan IV | 14 |
| 2 | Golongan III | 26 |
| 3 | Golongan II | 6 |
| 4 | Golongan I | 2 |
| | Jumlah | 48 |

F SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu per tanggal 31 Desember 2017 didukung oleh sarana dan prasarana dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|----------------------------|----------|
| 1. | Tanah | 1.340 m2 |
| 2. | Gedung dan Bangunan Kantor | 2.545 m2 |
| 3. | Peralatan dan Mesin | 568 unit |
| 4. | Aktiva Tetap Lainnya | 879 buku |
| 5. | Kendaraan Dinas : - Roda 4 | 10 unit |
| | - Roda 2 | 13 unit |

Sumber : laporan mutasi barang tahun 2017

Sarana dan Prasarana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu dengan kondisi seluruhnya cukup memadai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah tanah yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 4.477.400,-

2. Gedung dan Bangunan Kantor

Gedung dan Bangunan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah Bangunan Permanen yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.470.568.000,-

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah Peralatan dan Mesin yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.112.889.636,-

4. Aset Tetap Lainnya

Aktiva tetap lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah berupa buku perpustakaan yang kondisinya cukup baik, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 13.240.400,- dengan rincian Buku dan Perpustakaan Rp. 3.370.400,- dan Barang Bercorak Kebudayaan Rp. 9.870.000,-

5. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.263.707.302,-

G. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGI ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi Balitbang Provsu dalam menjalankan perannya sebagai lembaga teknis yang membantu Gubernur dibidang penelitian adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM baik tenaga Fungsional Peneliti maupun Fungsional Umum juga merupakan salah satu kendala keberhasilan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan teknis/ administrasi yang dilaksanakan oleh fungsional umum, dan fungsional peneliti yang diperlukan sebagai pelaksana kegiatan penelitian.
2. Adanya Moratorium penghentian penerimaan CPNS, yang mengakibatkan proses rekrutmen PNS khususnya tenaga fungsional peneliti menjadi terkendala.
3. Tentang “kepakaran peneliti”, masih menjadi masalah oleh karena tuntutan issue-issue yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan bidang studi yang dimiliki para peneliti sehingga Balitbang masih memerlukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
4. Setiap tahun Balitbang mengalokasikan anggaran untuk diklat peneliti dalam rangka menghasilkan peningkatan jumlah jabatan fungsional peneliti, namun karena anggaran Balitbang Provsu termasuk kecil, maka jumlah anggaran untuk diklat peneliti masih perlu ditambah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Renstra Balitbang Provsu) merupakan rencana tindakan kegiatan mendasar jangka panjang yang disusun dan dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah terkait, Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan pihak swasta. Renstra disusun sedemikian bersifat adaptif terhadap perubahan dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi.

Berdasarkan Renstra 2013 – 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang dihubungkan dengan pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengambilan keputusan dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, yaitu ” **Menjadi Balitbang yang menghasilkan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan menuju Sumatera Utara yang berdaya saing** ”, guna melaksanakan mandat tersebut secara profesional, dituntut mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, sehingga pimpinan satuan kerja beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.

Misi merupakan cara untuk mencapai Visi, dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, berdasarkan hal diatas dan untuk pencapaian Visi tersebut Balitbang Provsu mempunyai Misi , yaitu :

- 1) Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan di Provsu.
- 2) Meningkatkan kerjasama jejaring iptek dan inovasi dengan Sistim Inovasi Daerah (SIDa).
- 3) Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan hasil penelitian dan pengembangan yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan litbang di Provsu
- 2) Peningkatan kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- 3) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan daya saing hasil penelitian dan pengembangan yang strategis
- 2) Meningkatnya kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- 3) Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya kelitbangan dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
- 2) Meningkatkan jejaring iptek dan inovasi
- 3) Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan.

Arah kebijakan Balitbang Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut :

- 1) Penguatan sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 2) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

- 3) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis Balitbang Provsu 2013-2018.

Indikator Kinerja Utama Balitbang Provsu yang akan digunakan untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|----|--|--|
| | (1) | (2) |
| 1 | Meningkatnya kerjasama jejaring Iptek dan inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Jumlah MoU yang dihasilkan |
| 2 | Tersusunnya rumusan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai bahan kebijakan pembangunan | Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan penetapan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menyusun Penetapan Kinerja yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2017. Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2017 mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja atas sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun tersebut

Penetapan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. Penetapan Kinerja Tahun 2017

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|---|-----------------|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tersusunnya rumusan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai bahan kebijakan pembangunan | Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan | 12 Jenis | Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 4.014.645.200,- |
| | | 1). | Penelitian tentang Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara | 290.000.000,- |
| | | 2). | Analisis Epektifitas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD di Sumatera Utara | 285.5460.000,- |

| | | | | |
|--|--|------|---|---------------|
| | | 3). | Kajian Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 288.200.000,- |
| | | 4). | Intensif Penelitian badi Mahasiswa di Sumatera Utara | 975.100.000,- |
| | | 5). | Pendampingan dan Sosialisasi Teknologi Terapan | 449.000.000,- |
| | | 6). | Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 290.000.000,- |
| | | 7). | Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Sosial dan Kependudukan | 294.200.000,- |
| | | 8). | Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 282.586.800,- |
| | | 9). | Kajian-kajian lainnya yang mendukung Bidang Inovasi dan Teknologi | 290.000.000,- |
| | | 10). | Evaluasi dan Analisis Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Rentang 10 Tahun | 190.000.000,- |
| | | 11). | Study Dampak Pembangunan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi terhadap Senrta-sentra Ekonomi di Jalan Alteri Medan – Tebing Tinggi | 187.371.600,- |
| | | 12). | Prastudi Kelayakan Menciptakan Kampung Daur Ulng di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang | 192.640.000,- |

| Meningkatnya Kerjasama Jejaring Iptek dan Inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Jumlah MoU yang dihasilkan | 1 MoU | Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | 92.698.400,- |
|---|----------------------------|-------|--|--------------|
| | | | Peningkatan Produksi Sawit melalui Diseminasi Benih Unggul dan Kultur Teknis | 92.698.400,- |

Adapun Program/Kegiatan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dititik beratkan pada 2 (satu) Program yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 10 (sepuluh) jenis kegiatan dan Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan terselenggaranya Kerjasama (MoU) dengan Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Kerjasama Kelitbangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Ada 1 (satu) kegiatan pada Program Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang tidak dilaksanakan karena bukan merupakan tupoksi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yaitu kegiatan Intensif Penelitian bagi Mahasiswa di Sumatera Utara karena karena sesuai hasil konsultasi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
2. Pasal 79 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penganggaran pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Kegiatan di tampung di P.APBD TA. 2017 adalah :

1. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu kegiatan Penyusunan DED Gedung Kantor Balitbang Provsu yang mana direncanakan pada Tahun 2018 akan dilaksanakan renonasi gedung Kantor Balitbang Provsu
2. Pada Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu Kegiatan Kunjungan Kerja Keluar Negeri yang mana Kunjungan Kerja ke Luar Negeri ke China
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Mengurangi jumlah anggaran pada suatu kegiatan adalah :

1. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD Balitbang Provsu.
- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran Tersusunnya rumusan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai bahan kebijakan pembangunan, yang menjadi indikator kinerja yaitu jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan, dengan target 6 (enam) jenis. Dalam pelaksanaan realisasinya dihasilkan 10 (delapan) jenis bahan kebijakan untuk dijadikan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah. Sasaran ini di dukung melalui Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis ini antara lain :

Realisasi kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2017

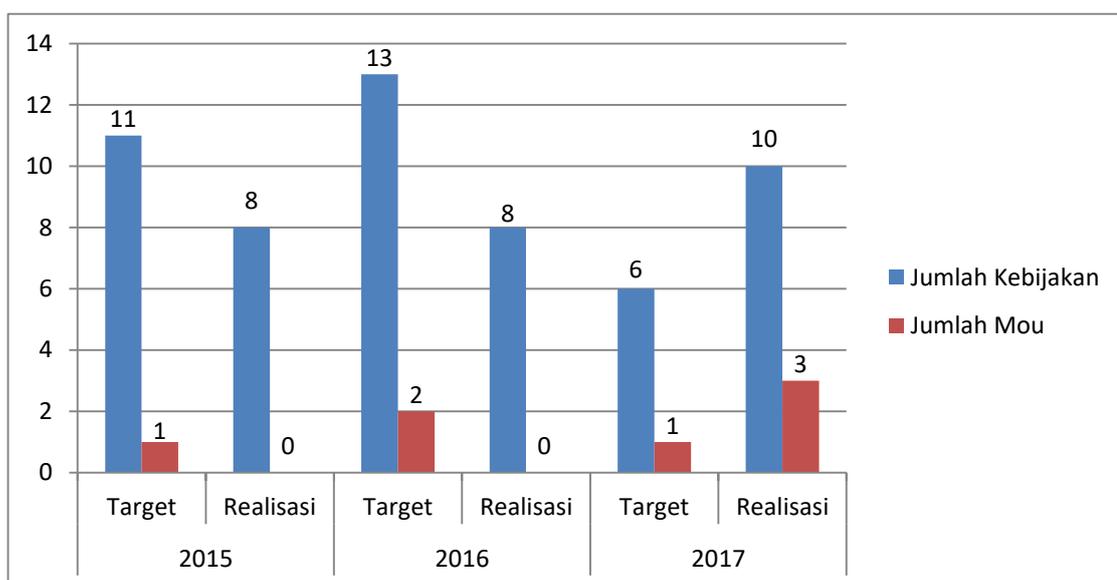
| Tahun | 2017 | |
|------------------|--------|-----------|
| | Target | Realisasi |
| Jumlah Kebijakan | 6 | 10 |
| Jumlah Mou | 1 | 3 |
| | | |

Selama tahun 2017 target kinerja untuk jumlah kebijakan sebanyak 6 dan realisasinya 10, sedangkan jumlah Mou targetnya 1 dan realisasinya 3. Kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Kerjasama Kelitbangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah, ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi penguatan kelembagaan kelitbangan, pelaksanaan kegiatan kelitbangan, Sistem Inovasi Daerah (SIDa). ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara dengan 3 (tiga) Kepala Daerah pada tanggal 5 Desember 2017 yaitu :

1. Bupati Labuhan Batu;
2. Bupati Labuhan Batu Utara;
3. Bupati Padang Lawas Utara.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

| Tahun | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Jumlah Kebijakan | 11 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 45 | |
| Jumlah Mou | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |



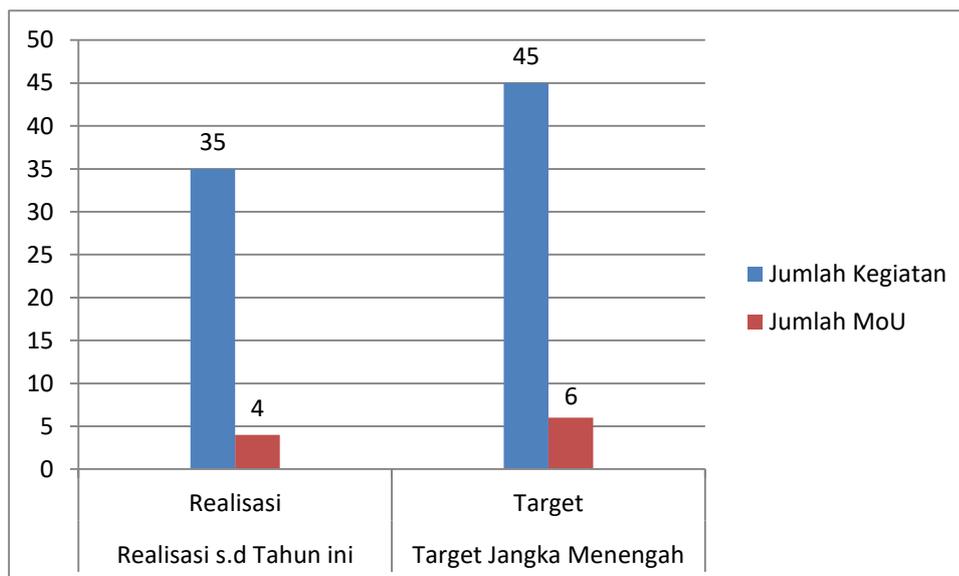
Dari Tabel dapat dilihat pada Tahun 2015 terdapat 11(sebelas) target kebijakan yang harus dicapai dan realisasi 8 (delapan) kebijakan yang berarti tercapai target 100 %. Adapun Mou pada Tahun 2015 target 1(satu) Mou dan realisasi 0 (nol) Mou dan target tidak tercapai.

Dari grafik dapat diketahui pada Tahun 2016 terdapat 13 (tiga belas) target kebijakan yang harus dicapai dan realisasi sebanyak 8 (delapan) kebijakan yang berarti tercapai 100% dan Tahun 2016 terdapat 13 (tiga belas) target kebijakan yang harus dicapai dan realisasi sebanyak 8 (delapan) kebijakan yang berarti tercapai 61,53%. Adapun Mou pada Tahun 2016 terdapat target 1(satu) Mou dan realisasi tidak tercapai, sedangkan pada Tahun 2016 terdapat target 1 Mou dan realisasi tidak tercapai

Adapun pada tahun 2017 target kebijakan yang harus dicapai 6 (enam) dan realisasi 10 (sepuluh) terdapat peningkatan lebih dari 100% begitu juga dengan Mou melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) dan realisasinya 3 (tiga).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

| | Realisasi s.d. Tahun ini | Target Jangka Menengah |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| | Realisasi | Target |
| Jumlah Kebijakan | 35 | 45 |
| Jumlah Mou | 4 | 6 |



Berdasarkan Tabel Rencana Strategis Jangka Menengah tahun 2014 – 2018 terdapat 45 target jumlah kebijakan ditambah 6 jumlah MoU yang harus dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dan sampai tahun 2017 yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 telah tercapai realisasi sebanyak 35 kebijakan dan 4 MoU. Ini berarti dalam tahun 2018 mendatang target jumlah kebijakan yang harus dicapai sebanyak 45 kebijakan dan target jumlah MoU sebanyak 6 MoU.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dari table hasil capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2015 , 2016 dan 2017 adanya penurunan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu capaian kinerja pada tahun 2015 sebanyak 11 jenis dan 1 MoU, tahun 2016 sebanyak 13 jenis dan 2 MoU, dan tahun 2017 sebanyak 6 jenis dan 1 MoU. Penurunan jumlah capaian kinerja ini sesuai dengan penurunan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Namun bila dilihat dari persentase tiap

tahunnya capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja mencapai 100%, artinya target tiap tahun sasaran strategis selalu tercapai.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai jumlah pegawai 48 orang, namun SDM yang khusus melaksanakan kegiatan penelitian.

Fungsional Peneliti berjumlah 7 orang. Dari jumlah peneliti yang ada tersebut kiranya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kepakaran masing-masing untuk melaksanakan penelitian di Balitbang Provsu.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Penetapan Kinerja Balitbang Provsu adalah melalui Program/Kegiatan yang mendukung untuk sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Penetapan Kinerja Balitbang Provsu Tahun 2017.

Penetapan Kinerja Balitbang Provsu Tahun 2017, yaitu: **Tersusunnya rumusan hasil litbang yang bersifat invensi dan inovatif sebagai bahan kebijakan pembangunan**, didukung oleh Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui pelaksanaan 10 (sepuluh) kegiatan penelitian. Dari hasil setiap pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut diharapkan mampu dijadikan sebagai rekomendasi bahan kebijakan pembangunan bagi pemerintah, yaitu sebagaimana tercantum indikator kinerja pada Penetapan kinerja yaitu Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan.

B REALISASI ANGGARAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA BALITBANG PROVSU TAHUN ANGGARAN 2017

| No | Uraian | Pagu | Realisasi | Persentase |
|----|------------------------|------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Belanja Langsung | 10.151.353.595,- | 9.367.297.442,- | 92,28 |
| 2. | Belanja Tidak Langsung | 8.436.111.000,- | 7.020.330.887,- | 83,22 |

Pada Tahun Anggaran 2017 total belanja langsung Balitbang Provsu adalah sebesar Rp. 10.151.353.442,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.436.931.000,- , sehingga total anggaran belanja Balitbang Provsu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 18.587.464.595,-. Realisasi belanja langsung tahun 2017 adalah sebesar Rp. 9.367.297.442,- atau 92,28 %, sedangkan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.7.020.330.887,-. Atau sebesar 83,22%. Akuntabilitas keuangan berdasarkan penetapan kinerja pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Program | Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi Anggaran | Persen (%) |
|-----------|---|--|-----------------|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | |
| 1. | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.000.000 | 14.822.660 | 92,64 |
| 2. | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | 256.620.000 | 202.175.958 | 78,78 |
| 3. | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 50.000.000 | 34.096.300 | 68,19 |
| 4. | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| 5. | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| 6. | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| 7. | | Penyediaan makanan dan minuman | 80.000.000 | 76.930.000 | 96,16 |
| 8. | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 535.050.000 | 513.853.673 | 96,04 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------|
| 9. | | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/ Keuangan | 250.000.000 | 243.550.000 | 97,42 |
| 10. | | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pramubakti | 423.960.800 | 407.510.800 | 96,12 |
| 11. | | Penyediaan Jasa Keamanan dan Supir Kantor | 252.210.000 | 248.610.000 | 98,57 |
| 12. | | Pelaksanaan Forum SKPD Balitbang Provsu | 57.625.560 | 48.985.560 | 85,01 |
| II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | |
| 1. | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 623.024.685 | 554.409.720 | 88,99 |
| 2. | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 315.100.000 | 313.738.000 | 99,57 |
| 3. | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 310.000.000 | 214.734.921 | 69,27 |
| 4. | | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Balitbang Provsu | 585.000.000 | 554.996.000 | 94,87 |
| 5. | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan | 50.000.000 | 34.248.000 | 68,50 |
| 6. | | Penyusunan DED Gedung Kantor Balitbang Provsu | 50.000.000 | 49.665.000 | 99,33 |
| III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| 1. | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari | 56.000.000 | 47.200.000 | 84,29 |

| | | | | | |
|------------|---|--|-------------|------------|--------|
| | | Tertentu | | | |
| 2. | | Pengadaan Pakaian Dinas Harian | 43.200.000 | 47.200.000 | 84,29 |
| IV. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| 1. | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 99.800.000 | 15.950.000 | 15,98 |
| 2. | | Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani | 50.400.000 | 49.000.000 | 97,22 |
| 3. | | Outbond Training Bagi PNS dan Tenaga Harian Lepas Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu | 100.000.000 | 99.979.000 | 99,98 |
| V. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | | | | |
| 1. | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 14.500.000 | 10.900.000 | 75,17 |
| 2. | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 20.500.000 | 14.100.000 | 68,78 |
| 3. | | Penyusunan Laporan Aset Tetap | 11.100.000 | 11.100.000 | 100,00 |
| 4. | | Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Instansi Pemerintah | 14.600.000 | 10.675.000 | 73,12 |
| 5. | | Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA APBD Balitbang Provsu | 40.500.000 | 38.440.000 | 94,91 |
| 6. | | Penyusunan Renja Balitbang Provsu | 51.800.000 | 51.520.000 | 99,46 |
| 7. | | Penyusunan LKPJ dan LPPD Balitbang Provsu | 15.500.000 | 14.515.000 | 93,65 |

| | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-------------|--------|
| 8. | | Penyusunan Laporan Database Administrasi Kepegawaian Balitbang Provsu | 28.090.490 | 24.090.490 | 85,76 |
| 9. | | Penyusunan Laporan Pengurusan Izin Penelitian di Balitbang Provsu | 6.152.410 | 5.462.410 | 88,78 |
| 10. | | Penataan Arsip Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 7.618.350 | 7.618.350 | 100,00 |
| 11. | | Biaya Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan | 29.777.500 | 29.777.500 | 100,00 |
| VI. | Program Diseminasi Informasi Teknologi | | | | |
| 1. | | Evaluasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Litbang | 198.000.000 | 196.421.000 | 99,20 |
| 2. | | Penyusunan dan Penerbitan Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 100.000.000 | 94.383.110 | 94,38 |
| 3. | | Pencetakan buku rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan | 20.600.000 | 20.600.000 | 100,00 |
| 4. | | Sentra HKI Lotus Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 100.000.000 | 98.598.000 | 98,60 |
| 5. | | Biaya Operasional Dewan Riset Daerah | 809.525.800 | 796.493.056 | 98,39 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|-------------|--------|
| 6. | | Pembuatan Website Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 100.000.000 | 85.800.000 | 85,80 |
| 7. | | Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara | 24.800.000 | 23.820.000 | 96,05 |
| 8. | | Pendataan hasil-hasil penelitian dalam berbagai ilmu kajian di Sumatera Utara | 98.754.400 | 98.619.400 | 99,86 |
| 9. | | Penyusunan dan Penerbitan Media Sosialisasi Balitbang Provsu | 30.500.000 | 30.500.000 | 100,00 |
| 10. | | Penyusunan Dokumen Agenda Riset Daerah (ARD) Provinsi Sumatera Utara 2017-2019 | 150.000.000 | 145.445.582 | 96,96 |
| 11. | | Penyusunan Dokumen Jakstrada Iptek Provinsi Sumatera Utara 2017-2019 | 100.000.000 | 99.330.000 | 99,33 |
| 12. | | Pembuatan Kelengkapan Atribut DRD Sumut periode 2014-2019 | 100.000.000 | 86.570.000 | 86,57 |
| VII. | Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah | | | | |
| 1. | | Peningkatan produksi sawit melalui Desiminasi Benih Unggul dan Kultur Teknis | 92.698.400 | 88.030.200 | 94,96 |
| VIII. | Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------------|-------------|-------|
| 1. | | Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Badan Litbang | 500.000.000 | 497.578.942 | 99,52 |
| 2. | | Penelitian Tentang Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara | 290.000.000 | 286.434.000 | 98,77 |
| 3. | | Analisis Efektivitas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD di Sumatera Utara | 285.546.800 | 247.900.700 | 86,82 |
| 4. | | Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | 288.200.000 | 249.215.100 | 86,47 |
| 5. | | Insentif Penelitian bagi Mahasiswa di Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Pendampingan dan Sosialisasi Teknologi Terapan | 449.000.000 | 439.057.100 | 97,79 |
| 7. | | Kajian-kajian Lainnya Yang Mendukung Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 290.000.000 | 240.537.000 | 82,94 |
| 8. | | Kajian-kajian Lainnya Yang Mendukung Bidang Sosial dan Kependudukan | 294.200.000 | 278.936.150 | 94,81 |
| 9. | | Kajian-kajian Lainnya Yang Mendukung Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 282.586.800 | 277.847.400 | 98,32 |
| 10. | | Evaluasi dan Analisis Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam | 190.000.000 | 172.270.750 | 90,67 |

| | | Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir | | | |
|-----|--|---|-------------|-------------|-------|
| 11. | | Studi Dampak Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap Sentra-sentra Ekonomi di Jalan Arteri Medan-Tebing Tinggi | 187.371.600 | 180.497.190 | 96,33 |
| 12. | | Prastudi Kelayakan Menciptakan Kampung Daur Ulang di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang | 192.640.000 | 176.876.940 | 91,82 |
| 13. | | Kajian-kajian Lainnya Yang Mendukung Bidang Inovasi dan Teknologi | 290.000.000 | 285.625.000 | 98,49 |
| 14. | | Kunjungan Kerja ke Luar Negeri | 80.000.000 | 30.056.480 | 37,57 |

BAB IV

PENUTUP

A KESIMPULAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Balitbang Provsu pada tahun 2017 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pencapaian target kinerja lebih dititik beratkan pada indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RENSTRA Balitbang Provsu dengan tidak mengesampingkan target kinerja indikator lainnya. Kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja SKPD. Efisiensi anggaran yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2016/17 antara lain adalah efisiensi biaya perjalanan dinas dan efisiensi honorarium kegiatan pegawai. Efisiensi dilakukan dengan cara selektif untuk kemudian diarahkan kepada kegiatan – kegiatan dengan sifat lebih prioritas dan penting.

Secara kumulatif, capaian kinerja Balitbang Provsu sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar 100%, sedangkan capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 92,28%. Apabila dilihat dari keseluruhan presentase capaian kinerja, maka kinerja Balitbang Provsu dapat dikategorikan tercapai dengan baik.

B SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

- 1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mengimplementasikan hasil penelitian.
- 2) Memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif khususnya kepada para peneliti sehingga aparatur di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara memiliki kompetensi yang tinggi di masing – masing bidang.
- 3) Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasil guna.

LAMPIRAN